



Rancangan Perbaikan Kinerja Anggaran Program Perekonomian dan Pembangunan Dengan Pendekatan *Value for Money*

Daffa Putra Gusti Prayoga^{1*}, Healthy Nirmalasari²

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

* E-mail Korespondensi: daffa21015@mail.unpad.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 13-06-2025

Revision: 18-06-2025

Published: 02-08-2025

DOI Article:

[10.24905/permana.v17i3.963](https://doi.org/10.24905/permana.v17i3.963)

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merancang rencana perbaikan kinerja anggaran Program Perekonomian dan Pembangunan Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021-2023 melalui pendekatan *Value for Money* dengan indikator Utama 3E (Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BP BUMD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja anggaran ekonomis dan efisiensi masih belum maksimal, dengan capaian ekonomis terendah terjadi pada tahun 2022 (74,66%) dan efisiensi seluruh tahun berada di atas 100%, atau tidak efektif. Ditinjau dari tingkat efektivitas, kinerja anggaran menunjukkan fluktuasi dengan perbaikan pada tahun 2023. Fluktuasi ini mengindikasikan perlu adanya perbaikan perencanaan anggaran berbasis kebutuhan riil dan diferensiasi strategi pembinaan berdasarkan karakteristik BUMD.

Kata Kunci: Kinerja Anggaran, Ekonomis, Efisiensi, Efektivitas, *Value for Money*, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

A B S T R A C T

This study aims to analyze and design a plan to improve the budget performance of the Economic and Development Program of the DKI Jakarta Provincial Regional-Owned Enterprises Development Agency for the 2021-2023 budget year through the Value for Money approach with the 3E Main indicators (Economy, Efficiency, and Effectiveness). The research method used is descriptive with a quantitative approach, based on secondary data obtained from the BP BUMD Government Agency Performance Report (LKIP). The results showed that economic and efficiency budget performance was still not optimal, with the lowest economic achievement occurring in 2022 (74.66%) and the efficiency of all years was above

Acknowledgment



100%, or ineffective. In terms of effectiveness, budget performance showed fluctuations with improvements in 2023. This fluctuation indicates the need for improved budget planning based on real needs and differentiation of coaching strategies based on BUMD characteristics.

Keywords: *Budget Performance, Economy, Efficiency, Effectiveness, Value for Money, Government Agency Performance Report (LKIP).*

© 2025 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Penerapan UU No. 23 Tahun 2014 memperluas peran DPRD dalam pembentukan perda, penganggaran, dan pengawasan, selaras dengan prinsip desentralisasi. Anggaran menjadi instrumen vital dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah, yang bertujuan memaksimalkan kesejahteraan masyarakat secara transparan dan akuntabel. Dalam konteks otonomi, APBD harus dikelola dengan efektif dan efisien, dengan pengukuran kinerja sebagai dasar evaluasi kebijakan berikutnya.

Pengukuran kinerja merupakan sebuah alat untuk mengukur kesuksesan suatu organisasi. Apabila dimasukkan ke dalam konteks organisasi sektor publik, (Mahmudi, 2019) menuturkan bahwa kesuksesan organisasi merupakan hal yang krusial guna memperoleh legitimasi dan dukungan publik, sehingga masyarakat menilai keberhasilan organisasi sektor publik berdasarkan kemampuan organisasi tersebut dalam menyediakan layanan publik yang terjangkau dan berkualitas. Penilaian kinerja juga diperlukan guna membantu pemerintah berpusat pada tujuan dan sasaran program-program kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), menjelaskan bahwa BUMD merupakan organisasi sektor publik yang sepenuhnya atau sebagian besar dananya dikuasai oleh Pemerintah Daerah, merupakan entitas usaha yang dibentuk untuk mendukung pembangunan dan perekonomian daerah. Badan ini berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam mengelola aset, menyediakan layanan publik yang bermutu, dan menghasilkan pendapatan melalui kegiatan komersial. Oleh karena itu, BUMD memiliki kaitan yang erat dengan penerimaan daerah. Analoginya, semakin besar laba yang didapatkan oleh BUMD, semakin besar pula pendapatan dividen yang akan didapat oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan dividen ini kelak akan diakui

sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) Provinsi DKI Jakarta merupakan satu-satunya badan yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan fungsi pendukung kegiatan pemerintahan dalam sektor keuangan pada aspek pengelolaan BUMD, khususnya di Provinsi DKI Jakarta. Hal ini menjadikan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta sebuah keunikan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai bentuk perwujudan dari strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka BP BUMD menuangkannya ke dalam program dan kegiatan yang berpatokan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi dari BP BUMD.

Program yang ditetapkan oleh BP BUMD Provinsi DKI Jakarta merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. BP BUMD merumuskan dua program. Program Perekonomian dan Pembangunan sebagai program utama berfokus pada pencapaian tujuan strategis yang selaras dengan visi dan misi jangka panjang BP BUMD. Sedangkan program bersama, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, seperti pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Fokus utama pada penelitian ini adalah mengangkat program utama dari BP BUMD, yakni Program Perekonomian dan Pembangunan. Berikut merupakan total capaian penyerapan anggaran untuk Program Perekonomian dan Pembangunan pada tahun anggaran 2021-2023:

Tabel 1 Anggaran Kegiatan Program Perekonomian dan Pembangunan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023 (Dalam Rupiah)

No	2021			2022			2023		
	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%	Anggaran	Realisasi	%
i	2.070.172.260	1.813.870.000	87,62	4.504.240.132	3.363.183.056	74,67	2.376.426.797	2.204.511.500	92,77
Total	1.813.870.000	87,62		Total	3.363.183.056	74,67	Total	2.204.511.500	92,77

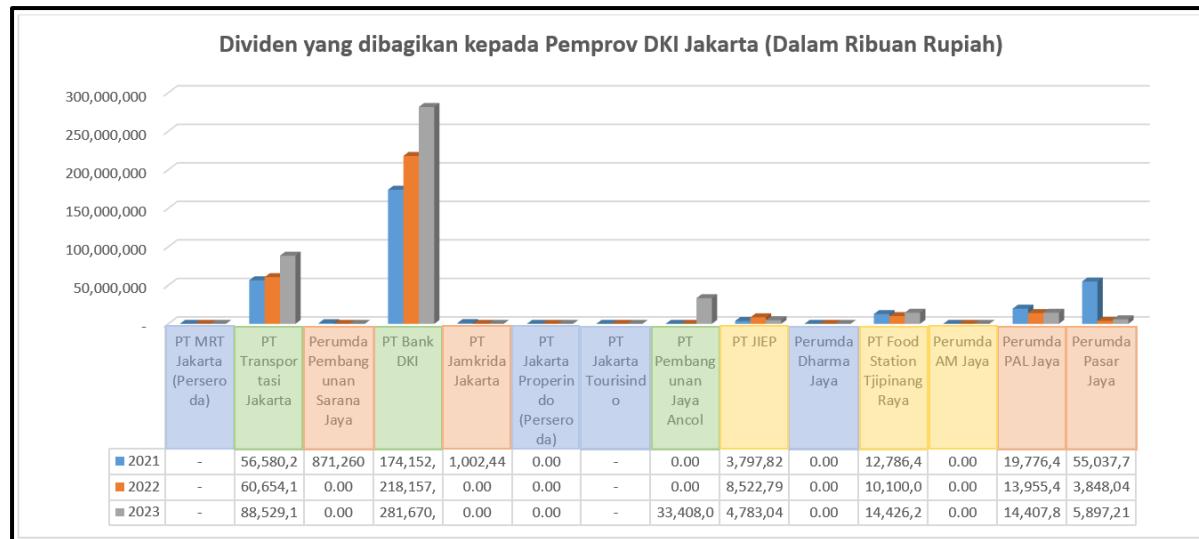
Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BP BUMD 2021-2023

Keterangan :

Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Jika ditilik pada tabel 1, kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD tahun 2021 menunjukkan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 87,62%. Sedangkan pada tahun 2022, realisasi anggaran hanya mampu terserap dengan persentase capaian realisasi anggaran sebesar 74,67%. Pada tahun 2023, pagu anggaran menurun hingga Rp2.127.813.335 jika dibandingkan dengan tahun 2022, yakni sebesar Rp2.376.426.797, dengan realisasi sebesar Rp2.204.511.500 atau sebesar 92,77%. Dari hasil penjabaran di atas, dapat diindikasikan bahwa persentase capaian realisasi anggaran tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Dengan kondisi pagu anggaran tahun 2022 yang mengalami peningkatan sebesar Rp2.434.067.872 dari tahun 2021, seharusnya Program Perekonomian dan Pembangunan dapat dilaksanakan jauh lebih baik dengan anggaran yang meningkat. Akan tetapi, Program Perekonomian dan Pembangunan kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2023, ini menandakan bahwa capaian realisasi anggaran pada Program Perekonomian dan Pembangunan masih belum mampu untuk menjaga kestabilannya.

Kegiatan Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD adalah kegiatan yang dilakukan demi mendorong tercapainya realisasi Program Perekonomian dan Pembangunan. Berdasarkan yang tertuang dalam Rencana Strategis BP BUMD tahun 2023-2026, Program Perekonomian dan Pembangunan memiliki indikator kinerja program yakni kontribusi dividen, yang kelak akan diakui sebagai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Pasal 112 ayat (2), peran BUMD adalah untuk memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah, baik dalam bentuk dividen atau pajak dalam rangka mewujudkan kemakmuran daerah. Kontribusi dividen yang dihasilkan oleh BUMD lalu disalurkan kepada BP BUMD ini memberikan kontribusi besar kepada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Provinsi DKI Jakarta. Pada BP BUMD, setidaknya terdapat 14 BUMD yang kepemilikannya dipegang oleh Pemerintah, disajikan dalam tabel berikut berserta kontribusi dividen tiap tahunnya:


Gambar 1 Kontribusi Dividen BUMD yang Dibagikan Kepada Pemprov DKI Jakarta Tahun 2021-2023

Sumber: Laporan Tahunan BUMD, Data Diolah Penulis (2025)

Meskipun beberapa BUMD tidak dapat memberikan dividen pada periode 2021-2023 akibat kerugian atau penahanan laba untuk menutupi kerugian tahun sebelumnya, kontribusi mereka tetap terlihat dalam bentuk investasi kembali untuk pengembangan sektor-sektor strategis. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut merupakan kontribusi dividen yang berhasil diakumulasikan oleh BP BUMD melalui 14 BUMD selama periode tahun 2021-2023:

Tabel 2. Realisasi Kontribusi Dividen melalui BUMD yang berada di bawah naungan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023

Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Indikator Realisasi Anggaran (%)	Sasaran Kontribusi Dividen (Rp)	Realisasi Kontribusi Dividen (Rp)	Capaian Indikator Kontribusi Dividen (%)
2021	Rp2.070.172.260	Rp1.813.870.000	87,62	Rp660.000.000.000	Rp398.792.010.000	60,41
2022	Rp4.504.240.132	Rp3.363.183.056	74,62	Rp793.735.538.000	Rp402.424.109.000	50,7
2023	Rp2.376.426.797	Rp2.204.511.500	92,77	Rp542.500.000.000	Rp545.800.000.000	100,62

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Berdasarkan Tabel 2, dapat ditilik bahwa pada tahun 2021, pagu anggaran sebesar Rp2.070.172.260 hanya mampu terserap sebesar Rp1.813.870.000 dengan persentase capaian indikator realisasi kontribusi dividen sebesar 60,41%. Kurangnya pencapaian tersebut disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang meningkat yang mengakibatkan penurunan kinerja bisnis BUMD dan berdampak pada kinerja keuangannya. Dampak pandemi COVID-19 masih terasa hingga triwulan I dan II pada tahun 2022, pagu anggaran disiapkan sebesar Rp4.504.240.132 hanya mampu terserap sebesar Rp3.363.183.056 dengan persentase capaian

indikator realisasi kontribusi dividen yang hanya mampu menyentuh angka 50,7%. Walaupun demikian, realisasi kontribusi dividen pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup drastis, dengan kenaikan sebesar 49,92% jika dibandingkan dengan tahun 2022, meskipun pagu anggaran dan realisasi anggaran yang disiapkan untuk tahun 2023 menurun dari tahun 2022. Dari penjelasan tentang kontribusi dividen di atas yang menunjukkan fluktuasi persentase realisasi kontribusi dividen, dapat disimpulkan bahwa Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah belum mampu untuk menjaga kestabilan dari sasaran dividen yang telah ditetapkan.

Berdasarkan fenomena yang terjadi atas tidak tercapainya realisasi anggaran pada Program Perekonomian dan Pembangunan di BP BUMD yang mengakibatkan kontribusi dividen BUMD pada tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi dan tidak konsisten dalam mempertahankan keseimbangan kontribusi dividen, hal ini mendorong penulis untuk membahas dan memaparkan penelitian untuk mengukur kinerja anggaran di sektor pemerintahan menggunakan pendekatan *Value for Money*, di mana pendekatan ini menggunakan perhitungan anggaran dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Hal tersebut dilakukan guna mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan kinerja anggaran guna mencapai hasil yang lebih baik dalam pengelolaan dana publik.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah analisis kinerja anggaran program dengan pendekatan *Value for Money* pada Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah. Pengukuran kinerja anggaran yang dilakukan oleh penulis, memfokuskan penelitian pada salah satu program utama Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu Program Perekonomian dan Pembangunan.

Untuk mengatasi dan menyelesaikan isu yang berhubungan dengan performa anggaran BP BUMD Provinsi DKI Jakarta, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif. Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis deskriptif sebagai pendekatan untuk analisis. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan penghitungan persentase dengan membandingkan indikator dari masing-masing dimensi pengukuran yang dikemukakan oleh Mahmudi (2019). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi terkait fokus penelitian melalui dokumen-dokumen yang diunggah laman resmi BP BUMD, serta dokumentasi dengan mempelajari data sekunder terkait pengukuran kinerja anggaran, yaitu laporan keuangan, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Rencana Kerja



Instansi Pemerintah, dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diakses melalui laman resmi BP BUMD Provinsi DKI Jakarta.

Pengukuran dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Value for Money*, dengan dimensi sebagai berikut:

1) Pengukuran Ekonomis

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{Input Realisasi Anggaran}}{\text{Input Anggaran}} \times 100\%$$

Pengukuran ekonomi memiliki kriteria sebagai berikut, jika:

- a. Perolehan nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka nilai tersebut dikatakan ekonomis;
- b. Perolehan nilai perbandingan berada di rentang 85% - 100% ($X = 85\%-100\%$) maka nilai tersebut dikatakan cukup ekonomis;
- c. Jika perolehan nilai perbandingan berada di rentang 65% - 84% ($X = 64\%-84\%$) maka nilai tersebut dikatakan kurang ekonomis; dan
- d. Perolehan nilai perbandingan kurang dari 65% ($X < 65\%$) maka nilai tersebut dikatakan tidak ekonomis.

2) Pengukuran Efisiensi

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi memiliki kriteria sebagai berikut, jika:

- a. Perolehan nilai perbandingan kurang dari 90% ($X < 90\%$) maka nilai tersebut dikatakan sangat efisien;
- b. Perolehan nilai perbandingan berada di rentang 90% - 99% ($X = 90\% - 99\%$) maka nilai tersebut dikatakan efisien;
- c. Perolehan nilai perbandingan sama dengan 100% ($X = 100\%$) maka nilai tersebut dikatakan cukup efisien; dan
- d. Perolehan nilai perbandingan lebih dari 100% ($X > 100\%$) maka nilai tersebut dikatakan tidak efisien.

3) Pengukuran Efektivitas

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}} \times 100\%$$

Pengukuran efektivitas memiliki kriteria sebagai berikut, jika:

- a. Perolehan nilai perbandingan lebih dari atau sama dengan 100% ($X \geq 100\%$) maka nilai tersebut dikatakan efektif;
- b. Perolehan nilai perbandingan berada di rentang 85% - 99% ($X = 85\% - 99\%$) maka nilai tersebut dikatakan cukup efektif;
- c. Perolehan nilai perbandingan berada di rentang 65% - 84% ($X = 65\% - 84\%$) maka nilai tersebut dikatakan kurang efektif; dan
- d. Perolehan nilai perbandingan kurang dari 65% ($X < 65\%$) maka nilai tersebut dikatakan tidak efektif.

HASIL

Perhitungan Ekonomis

Menurut Mahmudi (2019) ekonomis adalah alat untuk mengukur tingkat kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. Ekonomi memiliki pengertian bahwa sumber daya input hendaknya diperoleh dengan harga paling rendah (spending less), yaitu harga yang mendekati harga pasar. Secara matematis, ekonomis merupakan perbandingan antara input dengan nilai rupiah untuk memperoleh input tersebut. Semakin besar nilai persentase ekonomis, maka kinerja keuangan pemerintah daerah dinilai semakin baik. Berikut merupakan hasil perhitungan ekonomis untuk Program Perekonomian dan Pembangunan pada BP BUMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021-2023:

Tabel 3. Perhitungan Ekonomis Kegiatan Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Perekonomian dan Pembangunan					
Kegiatan	Tahun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Ekonomis	Kriteria Ekonomis
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	2021	2.070.172.260	1.813.870.000	87,17%	Cukup Ekonomis
	2022	4.504.240.132	3.363.183.056	74,66%	Kurang Ekonomis
	2023	2.376.426.797	2.204.511.500	92,76%	Cukup Ekonomis

Sumber: Diolah Penulis (2025)

Analisis pengukuran ekonomis terhadap Program Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Pembinaan BUMD Provinsi DKI Jakarta menunjukkan tren yang fluktuatif

sepanjang periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, kinerja ekonomis berada pada kategori cukup ekonomis dengan tingkat realisasi anggaran sebesar 87,62% dari pagu yang ditetapkan. Capaian tersebut terjadi di tengah dampak pandemi COVID-19 yang masih cukup signifikan terhadap aktivitas pemerintahan dan perekonomian. Memasuki tahun 2022, meskipun terjadi peningkatan pada alokasi anggaran, tingkat realisasi justru menurun menjadi 74,67%, yang mencerminkan penurunan kinerja dari sisi ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan sumber daya tidak dimanfaatkan secara optimal dalam pelaksanaan program. Namun, pada tahun 2023 terjadi perbaikan signifikan, di mana realisasi anggaran mencapai 92,77% dari pagu yang disediakan. Capaian ini menandakan bahwa BP BUMD mampu meningkatkan efisiensi pengadaan input dengan penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan upaya pemulihan kinerja pengelolaan anggaran, meskipun masih diperlukan perbaikan berkelanjutan untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan kinerja ekonomis dalam jangka panjang.

Perhitungan Efisiensi

Menurut Mahmudi (2019) efisiensi merupakan indikator penting yang digunakan untuk menilai sejauh mana suatu instansi mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal guna menghasilkan keluaran (*output*) tertentu. Dalam organisasi sektor publik, efisiensi menjadi salah satu ukuran kinerja yang penting karena menyangkut penggunaan anggaran negara atau dana publik. Oleh karena itu, efisiensi diukur dengan membandingkan antara output (keluaran fisik atau capaian dari kegiatan/program) dengan input (sumber daya yang digunakan, terutama dari sisi anggaran atau biaya). Perbandingan ini dikenal juga dengan istilah *cost of output*, yang menggambarkan seberapa besar biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan satu unit *output*. Pengukuran efisiensi memerlukan data capaian fisik setiap kegiatan (*output*) dan persentase anggaran program (*input*) tahun 2021 hingga tahun 2023 kemudian dikalikan dengan 100%. Suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output sebesar-besarnya dengan input tertentu (*spending well*). Berikut merupakan hasil perhitungan efisiensi untuk Program Perekonomian dan Pembangunan pada BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023:

Tabel 4. Perhitungan Efisiensi Kegiatan Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Perekonomian dan Pembangunan					
Kegiatan	Tahun	Realisasi Keuangan (Input)	Realisasi Fisik (Output)	Efisiensi	Kriteria Efisiensi
Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	2021	87,62%	103,25%	117,87%	Tidak Efisien
	2022	74,66%	100%	133,95%	Tidak Efisien
	2023	92,77%	100%	107,78%	Tidak Efisien

Sumber: Diolah Penulis (2025)

Dari perspektif efisiensi, pelaksanaan Program Perekonomian dan Pembangunan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta juga menunjukkan dinamika yang mencerminkan tantangan dalam pemanfaatan sumber daya secara optimal. Pada tahun 2021, program dinilai tidak efisien yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara *input* yang digunakan dan *output* yang dihasilkan akibat penyesuaian operasional selama pandemi. Situasi memburuk pada tahun 2022, di mana peningkatan anggaran tidak diikuti oleh peningkatan hasil yang sepadan, mengindikasikan inefisiensi dalam penggunaan sumber daya. Hal ini mencerminkan lemahnya kemampuan dalam mengonversi *input* menjadi *output* secara optimal, serta potensi pemborosan anggaran pada beberapa sub kegiatan. Namun demikian, tahun 2023 menampilkan perbaikan signifikan, ditandai dengan rasio efisiensi yang meningkat dan penggunaan anggaran yang lebih proporsional terhadap capaian *output*. Perubahan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam perencanaan program dan pengelolaan kegiatan, sekaligus menunjukkan peningkatan koordinasi internal dalam pelaksanaan program. Meskipun begitu, kestabilan efisiensi masih menjadi tantangan, terutama dalam hal penyusunan strategi pelaksanaan yang adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi dan sosial di wilayah DKI Jakarta.

Perhitungan Efektivitas

Menurut Mahmudi (2019) efektivitas merupakan tingkat keberhasilan proses dengan membandingkan antara hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Pengukuran nilai efektivitas memerlukan data capaian kinerja dari indikator kinerja program berdasarkan Laporan Rencana Kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2024. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif pada proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending

wisely).

Perhitungan *outcome* melibatkan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasi kinerja yang dicapai pada setiap tahunnya. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program tersebut berhasil memenuhi tujuan yang direncanakan dan memberikan gambaran tentang pencapaian hasil dalam mendukung urusan pemerintah daerah. Hasil perhitungan *outcome* ini menjadi dasar dalam menentukan tingkat efektivitas suatu program. Terdapat kriteria kinerja efektivitas yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan menilai sejauh mana suatu program atau kegiatan berhasil dalam mencapai tujuannya. Berikut merupakan perhitungan *outcome* untuk Program Perekonomian dan Pembangunan yang memiliki indikator kinerja nilai dividen yang disetor pada periode anggaran tahun 2021 hingga 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 Perhitungan *Outcome* Program Perekonomian dan Pembangunan

Program Perekonomian dan Pembangunan						
Indikator	Tahun	Target Kinerja (Rp)	Realisasi Kinerja (Rp)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian <i>Outcome</i> (%)
Nilai	2021	660.000.000.000	398.792.010.000	100	60,41	60,41
Dividen	2022	793.735.538.000	402.424.109.000	100	50,7	50,7
yang yang Disetor	2023	542.500.000.000	545.800.000.000	100	100,62	100,62

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Setelah diketahui capaian *outcome*, langkah selanjutnya adalah melakukan perhitungan efektivitas Program Perekonomian dan Pembangunan BP BUMD dengan membandingkan *outcome* yang diperoleh terhadap *output* yang dihasilkan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program telah berhasil memenuhi target yang telah direncanakan serta memberikan manfaat sesuai dengan tujuan awal. Perhitungan efektivitas ini juga memberikan gambaran tentang kinerja program dalam mencapai sasaran yang diharapkan dari tahun ke tahun. Berikut disajikan perbandingan nilai efektivitas untuk tahun 2021, 2022, dan 2023 dalam bentuk tabel:

Tabel 6 Perbandingan Nilai Efektivitas Program Perekonomian dan Pembangunan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023

Program Perekonomian dan Pembangunan				
No	Tahun	Realisasi Fisik (output)	Capaian Kinerja (outcome)	Efektivitas
1	2021	103,25%	60,41%	58,5%
2	2022	100%	50,7%	50,7%
3	2023	100%	100,62%	100,62%

Sumber: Data Diolah Penulis (2025)

Efektivitas Program Perekonomian dan Pembangunan pada BP BUMD Provinsi DKI Jakarta selama periode 2021–2023 menunjukkan dinamika kinerja yang mencerminkan kemampuan institusi dalam mencapai *outcome* yang telah ditetapkan. Pengukuran efektivitas dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan antara target dan realisasi kontribusi dividen sebagai indikator utama *outcome* program. Berdasarkan hasil perhitungan dalam Tabel 6, efektivitas program pada tahun 2021 tercatat berada dalam kategori kurang efektif, dengan persentase sebesar 58,5%, yang mencerminkan belum optimalnya realisasi kontribusi dividen terhadap target yang telah ditetapkan. Penurunan performa tersebut terutama disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang melemahkan kinerja keuangan sejumlah BUMD. Kondisi menurun berlanjut di tahun 2022, dengan nilai efektivitas hanya mencapai 50,7%, menempatkannya pada kategori tidak efektif, meskipun alokasi anggaran meningkat secara signifikan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan input dengan pencapaian *outcome*. Namun, pada tahun 2023 terjadi lonjakan efektivitas yang sangat signifikan, dengan realisasi kontribusi dividen mencapai 100,62%, yang berarti program telah melampaui target dan masuk kategori sangat efektif. Perubahan ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam koordinasi internal, peningkatan kinerja BUMD, serta pemulihan ekonomi secara makro. Meskipun demikian, fluktuasi efektivitas selama tiga tahun terakhir menunjukkan perlunya penyusunan strategi yang lebih adaptif dan berkelanjutan untuk menjaga konsistensi pencapaian hasil pada masa mendatang.

Rancangan Perbaikan

Evaluasi terhadap Program Perekonomian dan Pembangunan BP BUMD Provinsi DKI Jakarta tahun 2021–2023 menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Value for Money* belum optimal. Meskipun efektivitas meningkat signifikan pada 2023, aspek ekonomis dan efisiensi masih menghadapi kendala. Pada 2022, tingkat ekonomis tergolong rendah akibat lonjakan anggaran tanpa perencanaan berbasis kebutuhan aktual, sehingga diperlukan pendekatan *just-in-time budgeting* dan sinkronisasi kegiatan. Dari sisi efisiensi, seluruh tahun menunjukkan angka di atas 100% (tidak efisien), mengindikasikan ketidakseimbangan antara *output* dan penggunaan anggaran. Perbaikan dapat dilakukan melalui penyesuaian indikator *output*, standar biaya, dan pelaporan fisik yang terukur. Sementara itu, efektivitas hanya tercapai pada 2023, didorong oleh kontribusi BUMD yang berorientasi laba. Untuk menjaga tren positif ini, strategi pembinaan perlu disesuaikan: menetapkan target dividen progresif bagi BUMD komersial dan menggunakan indikator *outcome* non-finansial untuk BUMD layanan publik.

SIMPULAN

Kinerja anggaran menunjukkan fluktuasi dalam perhitungan ekonomis. Tahun 2021 tergolong cukup ekonomis (87,17%), didorong oleh kinerja BUMD yang sehat. Namun, terjadi penurunan pada 2022 menjadi tidak ekonomis (74,66%) akibat minimnya pengajuan PMD dan denda atas keterlambatan kegiatan. Tahun 2023 membaik kembali ke 92,76%, dengan perluasan cakupan kegiatan melalui penambahan sub-kegiatan. Selama tiga tahun berturut-turut, kinerja anggaran tergolong tidak efisien, dengan angka efisiensi selalu di atas 100%. Tahun 2021 mencapai 117,87%, 2022 meningkat menjadi 133,95%, dan 2023 membaik ke 107,78%. Ketidakefisienan ini disebabkan oleh kegiatan insidental yang tidak terjadwal pasti, serta denda akibat keterlambatan pelaksanaan. Efektivitas program tergolong rendah pada 2021 (58,5%) dan 2022 (50,7%) karena kontribusi dividen BUMD tidak memenuhi target. Namun, tahun 2023 menunjukkan perbaikan signifikan dengan capaian 100,62%, mencerminkan dampak positif dari peningkatan kinerja beberapa BUMD strategis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, BP BUMD dapat melakukan penguatan perencanaan anggaran yang lebih fleksibel dan berbasis proyeksi kebutuhan riil, khususnya untuk kegiatan yang sewaktu-waktu dilakukan hanya jika terdapat kebutuhan, seperti uji kelayakan dan kepatutan. Kegiatan uji kelayakan dan kepatutan sebaiknya diproyeksikan berdasarkan histori kebutuhan tahun-tahun sebelumnya, serta pembuatan tabel periode pelaksanaan sekurang-kurangnya per triwulan dalam satu tahun anggaran untuk membantu meningkatkan nilai ekonomis serta mencegah sisa anggaran yang tidak terserap di akhir tahun anggaran. Dalam perencanaan penyusunan dokumen analisis investasi PMD, BP BUMD dapat melibatkan BUMD sejak tahap proses perencanaan penyusunan dokumen strategis seperti analisis investasi PMD agar dokumen yang dihasilkan relevan dengan kebutuhan aktual. Dengan demikian, BP BUMD sebagai badan pembinaan dapat turut serta mendorong BUMD-BUMD yang berada di bawah naungannya untuk mengajukan PMD sehingga dokumen yang telah disusun dapat dimanfaatkan dalam proses penganggaran dan pengambilan keputusan. BP BUMD juga perlu melakukan penguatan hubungan antara *output* administratif seperti dokumen kebijakan, kajian PMD, dan pengelolaan sistem informasi, dengan *outcome* yang bersifat strategis seperti peningkatan laba BUMD dan kontribusi dividen agar dapat menekan ketidakseimbangan antara pelaksanaan kegiatan dengan hasil yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anti, C. H. (2023). *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja dengan Menggunakan Metode Value for Money Pada Kantor Kementerian Pekerjaan Umum Balai Wilayah Sungai Sumatera II*.
- Arvina, N. (2022). *Teori Akuntansi* (S. Bahri (Ed.); Vol. 01).
- Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2021). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021*.
- Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2022). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022*.
- Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta. (2024). *Rencana Kerja Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2024*. <https://jdih.jakarta.go.id/dokumenPeraturanDirectory/0031/LampiranTambahan0000011117-31. Renja 2024 - BPBUMD.pdf>
- Cunha, A. A. Da, Herdi, H., & Aurelia, P. N. (2023). *Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Value for Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Sikka*. 2(3), 86–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.58192/populer.v2i3.1195>
- Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi dan Perubahan dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai dan Organisasi* (Cetakan 3).
- Enre, D. T. (2020). *Analisis Value for Money Anggaran Pendapatan Pada Pemerintah Kota Medan*.
- Hardani, Nur, A. H., Helmina, A., Roushandy, F. asri, Jumari, U., Evis, U. fatmi, Dhika, S. juliana, & Ria, I. rahmatul. (2023). Buku Metode Penelitian Kualitatif. In *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* (Vol. 5, Issue 1).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). *Buku-SAP-2021-1*.
- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik (Edisi Ketiga)*. Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah Edisi Terbaru*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah*.
- Putri, N. Z. A. (2020). *Analisis Value for Money Pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Romadhan, S., Siboro, S. F., Nuraliza, S., Putri, K., & Hia, V. (2024). *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Value Money Pada Pemerintah Kota*



Bandung Tahun 2020-2022 Universitas Bina Sarana Informatika Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi, pendidikan dan budaya di Indonesia, kesejahteraan penduduk (3). [https://doi.org/https://doi.org/10.61132/aepg.v1i2.258](https://doi.org/10.61132/aepg.v1i2.258)

Saputra, G. I., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Surakarta, U. M. (2021). *MENGGUNAKAN METODE VALUE FOR MONEY PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2020.*

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, interpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*, 1–274. <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.*

Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (1st edition). Kencana.